

HIKAYAT TANAH PAKEL: KONFLIK AGRARIA PETANI PAKEL DENGAN PERKEBUNAN PAKUDA 1925-1943

Imam Ghazali

Penulis Lepas

immgh@proton.me

Abstrak

Sejarah Desa Sumberejo Pakel sarat dengan konflik perebutan kuasa atas tanah. Hal tersebut, sejarah desa dan sengketa tanah, tidak dapat dipisahkan. Bahkan dapat dikatakan, sejarah Desa Sumberejo Pakel ialah sejarah konflik agraria. Demi memahami konflik agraria berkepanjangan yang berlangsung nyaris satu abad lamanya, penting untuk mengurai sejarah konflik agraria antara para petani Pakel dan Perkebunan Pakuda yang terjadi pada tahun 1925 hingga 1943. Lantas, bagaimana awal mula Desa Sumberejo Pakel terbentuk?; bagaimana konflik agraria petani Pakel dengan Perkebunan Pakuda terjadi?; dan bagaimana dampaknya? Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menjawab rumusan yang telah diungkap. Dengan tahapan: heuristik, kritik, interpretasi, dan terakhir, historiografi. Penelitian ini menunjukkan beberapa bagian penting. Sejarah kolonialisme di Banyuwangi yang penuh dengan peperangan telah membuat wilayah tersebut nyaris kehilangan penduduk. Dengan berakhirnya peperangan, perlahan pertumbuhan penduduk kembali terjadi, termasuk permukiman di sekitar *Alas Pakel*. Namun di saat yang sama, berkuasanya kolonialisme Belanda menghendaki eksploitasi tanah jajahan, salah satunya melalui perkebunan, yang berarti menuntut lebih banyak perampasan lahan. Di masa ini, pertentangan antara petani dan perkebunan kolonial terjadi di Desa Sumberejo Pakel. Konflik agraria tersebut merupakan konflik skala lokal, yang muncul seiring dengan perkembangan gerakan nasional, dan dipengaruhi situasi ekonomi dan politik internasional awal abad ke-20.

Kata Kunci: Hikayat Tanah Pakel, Konflik Agraria, Petani Pakel, Perkebunan Pakuda.

Abstract

*The history of Sumberejo Pakel Village is full of conflicts over land rights. This, village history and land disputes, cannot be separated. It can even be said that the history of Sumberejo Pakel Village is the history of agrarian conflicts. In order to understand the prolonged agrarian conflict that lasted for almost a century, it is important to unravel the history of the agrarian conflict between Pakel farmers and the Pakuda plantations that occurred from 1925 to 1943. So, how did Sumberejo Pakel Village originate?; how did the agrarian conflict between Pakel farmers and Pakuda plantations occur?; and what is the impact? This study uses historical methods to answer the formulation that has been revealed. With stages: heuristics, criticism, interpretation, and finally, historiography. This research shows several important parts. The history of colonialism in Banyuwangi which was full of wars has made the area almost lost its population. With the end of the war, population growth slowly resumed, including the settlements around *Alas Pakel*. But at the same time, the reign of Dutch colonialism required the*

exploitation of colonial lands, one of which was through plantations, which meant demanding more land grabs. During this time, conflicts between farmers and colonial plantations occurred in Sumberejo Pakel Village. The agrarian conflict was a local scale conflict, which arose along with the development of the national movement, and was influenced by the international economic and political situation in the early 20th century.

Keywords: *The Tale of Pakel's Land, Agrarian Conflict, Pakel Farmers, Pakuda Plantations.*

PENDAHULUAN

Wilayah Banyuwangi, sebagai tapak pusat kerajaan Blambangan, telah menjadi medan pertempuran yang panjang berabad-abad lamanya di tanah Jawa. Terhitung sejak abad ke-15 hingga abad ke-18, wilayah Blambangan selalu menjadi medan peperangan, baik perang dengan motif politik, agama, etnik, maupun perang antara penduduk lokal dengan penguasa era kolonial (Legene 2015: 221; Margana 2003). Berbagai perang yang terjadi di wilayah tersebut mempunyai faktor yang mendasari berbagai konflik, yaitu perebutan kuasa atas ruang hidup. Letak Banyuwangi yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat dengan tanah yang subur, menjadikan wilayah ujung timur Jawa kerap menjadi ajang sengketa wilayah; perebutan kuasa atas tanah (Anoegrajekti 2017: 4).

Meski begitu, kekuasaan Blambangan menjadi satu-satunya daerah yang tidak pernah benar-benar dikuasai Majapahit maupun Mataram, sekaligus yang paling akhir dan dengan susah payah dikuasai kolonial Belanda di tanah Jawa (Arifin 1995: 1). Dengan berbagai peristiwa tersebut, sejarah Banyuwangi yang sarat dengan perang dan perebutan kekuasaan disebut pula sebagai sejarah kekerasan (Margana 2015: 221). Sebab dengan jalan perang dan kekerasan, kekuasaan dapat menguasai suatu wilayah, dan penguasa yang berkuasa akan menguasai tanah sekaligus penduduk yang hidup di atasnya.

Masa kelam tanah Jawa, menurut Benedict Anderson (2000) “...dapat dipandang sebagai semacam Abad Kegelapan Jawa yang pekat, tersobek-sobek oleh rangkaian peperangan, pembuangan, perampokan, pembantaian, dan kelaparan tiada jeda” (hlm. 377), yang membuat wilayah tersebut nyaris kehilangan penduduknya. Bandingkan, di seluruh wilayah Blambangan,

penduduknya tidak lebih dari 3000 jiwa atau hanya 8,3 persen dari jumlah penduduk sebelum kolonisasi merambah ujung timur Jawa (Margana 2012: 219).

Setelah penguasa kolonial dan penguasa feodal menguasai wilayah Blambangan, pemerintah kolonial menjadikan pusat kerajaan Blambangan menjadi sebuah wilayah administrasi baru, Kabupaten Banyuwangi. Selain melakukan reorganisasi pemerintahan, membangun benteng pertahanan, restorasi hukum, pemilihan ibu kota baru, membangun infrastruktur, mendatangkan penduduk sebagai pekerja, pemerintah kolonial juga mulai menjalankan program eksploitasi ekonomi (Margana 2012: 199). Sebab, ciri pokok kolonialisme ialah eksploitasi dan ekstraksi tanah jajahan, dengan cara merampas lahan penduduk, salah satunya untuk industri perkebunan (Kartodirdjo 1991: 6-8). Hingga awal abad ke-20, pembangunan yang dilakukan penguasa kolonial membuat Banyuwangi mengalami pertumbuhan (kembali) penduduk. Di sisi lain, perkembangan perkebunan yang semakin pesat menuntut perluasan wilayah tanam, yang berarti menuntut lebih banyak perampasan lahan dan pembukaan tanah hutan.

Salah satu perampasan tanah terjadi di Desa Sumberejo Pakel, sebuah desa bernama 'Soemberredja' yang berdekatan dengan *Alas* Pakel. Pada dekade ketiga abad ke-20, perkumpulan petani hendak menggarap lahan di hutan. Agar tanah hutan tersebut dapat digarap oleh lebih banyak petani yang membutuhkan pekerjaan, pada 1925 perkumpulan petani mengajukan pembukaan hutan kepada Bupati Banyuwangi Notohadisuryo. Pada 1929, Bupati Banyuwangi mengeluarkan 'Soerat Idin Memboeka Tanah' bagi perkumpulan petani, tepatnya di wilayah hutan yang dikenal dengan 'Sengkan Kandang' dan 'Keseran' (Kwie 1943). Rupanya, tanah hutan yang sama akan dijadikan perluasan salah satu perusahaan perkebunan kolonial. Sebab tidak ada kejelasan penyelesaian masalah tersebut, petani melakukan *reclaiming* atas tanah hutan Sengkan Kandang dan Keseran, yang membuat perebutan tanah menjadi konflik agraria berkepanjangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji sejarah terbentuknya Desa Sumberejo Pakel, dengan merunut sejarah kolonialisme dan munculnya perkebunan yang beriringan dengan kolonialisme di Banyuwangi.

Pertumbuhan penduduk pascaperang memungkinkan terbentuknya kembali permukiman di sekitar *Alas* Pakel. Menguatnya kolonialisme salah satunya dalam bentuk perkebunan, bersamaan dengan terbentuknya permukiman penduduk, yang berujung pada pertentangan penguasaan atas tanah hutan. Dapat dikatakan, sejarah Desa Sumberejo Pakel serupa sejarah perebutan kekuasaan wilayah Blambangan, sebagai sejarah yang penuh konflik. Sebab keduanya, sejarah desa dan konflik agraria, tidak dapat dilepaskan di sepanjang narasi sejarah Desa Sumberejo Pakel.

Barangkali Desa Sumberejo Pakel hanya satu dari sekian banyak desa yang terdampak kolonialisme dan warisannya, yaitu perampasan tanah. Namun, yang penting untuk ditekankan, penduduk Desa Sumberejo Pakel mencoba melepaskan cengkeraman warisan kolonialisme tersebut. Sama halnya dengan rakyat Indonesia secara umum yang memperjuangkan kemerdekaan, begitu pula dengan para petani di Desa Sumberejo Pakel; yang berjuang untuk merdeka atas tanah di desanya. Dengan begitu, sejarah Desa Sumberejo Pakel sebagai sejarah lokal sama pentingnya dengan sejarah Republik Indonesia sebagai sejarah nasional. Tanpa adanya desa-desa kecil tersebut, tidak akan ada wilayah bernama Indonesia, dan itu mengapa penting untuk memahami sejarah orang-orang kecil di Desa Sumberejo Pakel sebagai bagian dari sejarah besar Republik Indonesia.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah untuk menguji dan menganalisis rekaman masa lampau secara kritis (Gottschalk 2008: 39). Metode penelitian sejarah secara umum mempunyai empat tahapan: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi, dan (4) historiografi (Sugeng 2015: 67). Tahap heuristik, penelitian ini dimulai dari pengumpulan arsip dokumen Belanda, Jepang, era Soekarno, Orde Baru, hingga Reformasi yang dimiliki oleh anggota Rukun Tani Sumberejo Pakel (RTSP). Pencarian arsip lainnya juga dilakukan, seperti di laman Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, Leiden University Libraries, Delpher, Gallica, Les Entreprises Coloniales Francaises, Data For Financial History, Collectie Overijssel, dan lainnya. Selain itu, pengumpulan sumber lisan juga dilakukan, tidak hanya sebagai penyeimbang sumber dokumen

(Thompson 2012: 25) tetapi juga “sebagai metode untuk mengungkap cerita-cerita dari komunitas yang dipinggirkan” (Roosa 2004: 2).

Langkah selanjutnya, kritik atau verifikasi, penulis melakukan pengecekan terhadap dokumen yang ditemukan, menganalisis temuan dengan membandingkan satu dokumen dengan dokumen lain dan tradisi lisan di tengah masyarakat, yang kemudian menjadi sebuah narasi yang saling berkaitan. Dengan langkah interpretasi, hasil temuan tersebut kemudian ditafsirkan, sebab “tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa bicara” (Kuntowijoyo 2013: 78). Lalu langkah terakhir, historiografi atau penulisan sejarah, dengan merunut sejarah Blambangan dan kolonialisme Belanda, juga sejarah berdiri dan berkembangnya berbagai perusahaan perkebunan kolonial di ujung timur Jawa. Sebab penulisan sejarah secara runut penting untuk dilakukan (Kuntowijoyo 2013: 80), dan—dengan harapan menuliskannya secara utuh—menuliskan sejarah konflik agraria Desa Sumberejo Pakel sebagai sejarah konflik lokal, yang terkait dengan perkembangan gerakan nasional, dan dipengaruhi situasi ekonomi dan politik internasional pada awal abad ke-20.

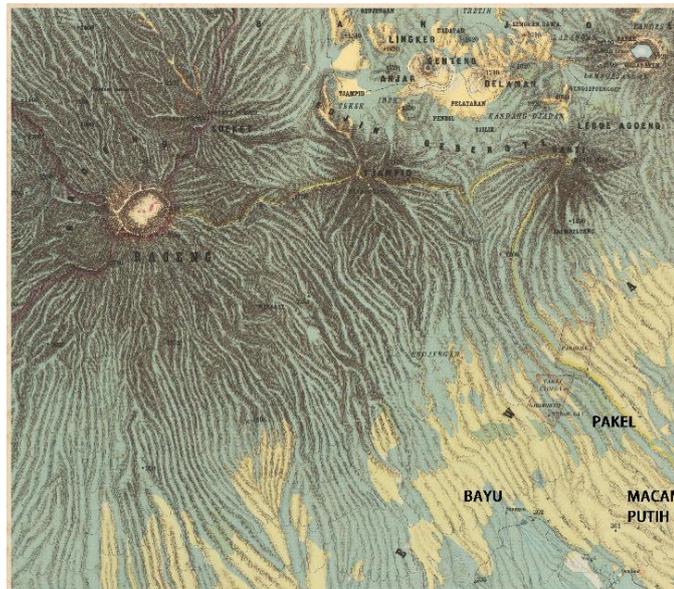
Dalam menyusun sejarah konflik secara kronologis dan kritis, penulisan sejarah perlu metode pendekatan penelitian untuk mengurai benang permasalahan tersebut. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori ekonomi politik Karl Marx. Perampasan tanah petani Sumberejo Pakel merupakan upaya pemisahan manusia atas ruang hidupnya, Marx menyebut hal ini sebagai proses akumulasi primitif, yaitu “...proses historikal perceraian produsen dari alat-alat produksi...” (2004: 845), yang berupa perampasan tanah, alat-alat pertanian, penangkapan hingga pemenjaraan petani Sumberejo Pakel. Akumulasi primitif, sebuah permulaan dari kapital, akan menuju pada proses akumulasi kapital, yang menyebabkan ekspansi sistem perkebunan yang lebih luas, guna menerapkan corak produksi kapitalisme hingga ke perdalaman hutan di Desa Sumberejo Pakel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desa Soemberredja di (*Alas*) Pakel.

Desa Sumberejo Pakel mulanya sebuah desa bernama ‘Soemberredja’ yang terletak di *Alas* Pakel (Topographische Inrichting 1915). Secara geohistoris, sekitar wilayah yang menjadi cikal desa tersebut pernah menjadi bagian dari kejayaan kerajaan Macan Putih pada abad ke-17 atau wilayah yang penduduknya terlibat dalam perang Puputan Bayu pada abad ke-18. Berabad silam, wilayah sekitar *Alas* Pakel, serupa narasi tragis Banyuwangi dalam sejarah Ujung Timur Jawa, turut kehilangan penduduknya karena peperangan panjang dan kemudian mulai ditempati kembali pada paruh abad ke-19 atau awal abad ke-20. Baik wilayah hutan Bayu (Desa Songgon) maupun hutan Sudyomoro (Desa Macan Putih) yang menjadi tilas peradaban rakyat Blambangan (Margana 2003; Arifin 1995: 228), letaknya berdekatan dengan *Alas* Pakel; *Alas* Bayu bagian barat daya sedangkan Macan Putih tepat di samping bagian tenggara *Alas* Pakel, wilayah yang kemudian menjadi Desa Sumberejo Pakel.

Gambar 1. Wilayah Desa Sumberejo Pakel (1888)



Sumber: Aan de Topographische Inrichting te's Gravenhage (1888)

Permukiman desa tua tersebut, serupa narasi keterasingan Banyuwangi, sama-sama menjadi wilayah *terra incognita*-sebagai “tanah tak dikenal”. Sebagai

wilayah antah-berantah, wilayah desa tersebut tidak tercatat hingga akhir abad ke-19. Namun kemudian, seiring laju kolonialisme yang membuka wilayah timur Jawa, wilayah desa tersebut mulai ‘terbentuk-kembali’. Meski awal abad ke-20 nama desa tersebut telah tercatat dalam dokumen pemerintah, namun secara resmi, tepatnya pada 1930, sensus administrasi hingga perdalaman desa terkecil baru dilakukan. Desa ‘Soemberredjopakel’ tercatat bagian dari *Onderdistrict* (Kecamatan) Kabat, *District* (Kawedanan) Rogojampi, *Regentschap* (Kabupaten) Banyuwangi (Schoel 1931: 362). Oleh sebab itu, meski hutan tersebut telah lama dihuni, nama desa ‘Sumberejo Pakel’ baru terbentuk awal abad ke-20.

Terbentuknya permukiman di Desa Sumberejo Pakel bersamaan dengan situasi ekonomi dan politik dunia. Pada masa awal krisis dunia 1920-an hingga masa depresi ekonomi yang dikenal sebagai *jaman meleset* (krisis malaise) dimulai sejak 1929 (Kartodirdjo 1991 :123), banyak buruh perkebunan yang dipecat, penganggur tanpa memiliki kepastian hidup, dan banyak penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan atau lahan garapan. Pada awal abad ke-20 itu pula, permukiman penduduk di sekitar hutan Pakel semakin bertambah dan mencoba saling bantu dalam mengatasi permasalahan sehari-hari. Di sisi lain, di waktu yang nyaris bersamaan, perkebunan kolonial yang juga terdampak krisis ekonomi dunia mencoba tetap bertahan dengan cara memperluas lahan garapan kebun di perdalaman hutan.

Meski era yang disebut ‘jaman meleset’ tersebut menambah penderitaan penduduk Banyuwangi, masa krisis juga memungkinkan penduduk Banyuwangi mengupayakan dan mengembangkan model pertanian rakyat secara mandiri, termasuk penduduk yang bermukim di *Alas* Pakel. Sebagai jawaban atas kehidupan yang makin tidak menentu di bawah kolonialisme, penduduk Pakel yang terdiri dari suku Osing, Jawa, dan Madura (Mahmudah 2021), mendirikan perkumpulan petani dan mengupayakan lahan garapan di sekitar hutan desa mereka, hutan yang dikenal ‘Sengkan Kandang’ dan ‘Keseran’ (Kwie 1943).

Rupanya, hutan yang tengah diupayakan perkumpulan petani Pakel untuk menjadi wilayah garapan pertanian merupakan wilayah hutan yang sama dengan wilayah yang tengah diincar salah satu perusahaan perkebunan kopi dan proyek

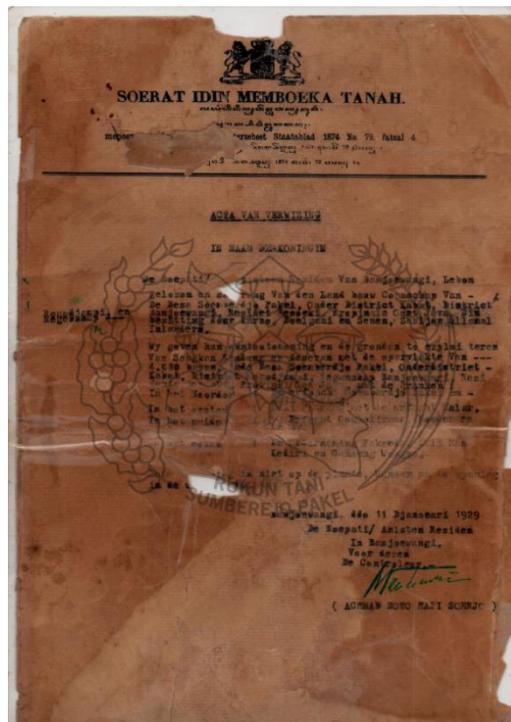
permukiman-perkebunan orang-orang Indo-Belanda. Praktis, dalam situasi dunia yang tengah dilanda krisis dan depresi ekonomi yang berdampak pada kehidupan hingga ke perdalaman desa di tengah hutan, konflik agraria menemukan titik temunya. Konflik perebutan tanah terjadi di Desa Sumberejo Pakel, antara ribuan petani yang membutuhkan lahan garapan dan perkebunan kolonial yang mencoba tetap meraup pundi keuntungan di tanah jajahan.

B. Rebutan Babat Sengkan Kandang *lan* Keseran

Hutan Sengkan Kandang dan Keseran merupakan hutan yang letaknya tidak jauh dari Desa Sumberejo Pakel. Mulanya, hutan tersebut merupakan tanah partikelir yang dikuasai oleh tuan tanah Belanda (Rukun Tani 2000), tetapi kemudian penduduk Pakel memanfaatkan hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, penduduk telah terbiasa memanen hasil bumi di *Alas* Pakel dan hutan sekitarnya (Mahmudah 2021). Demi kemaslahatan lebih banyak orang, upaya kepastian hukum perlu dilakukan agar petani dapat hidup dari hutan. Tepatnya pada 1925, perkumpulan petani yang diinisiasi oleh berbagai kelompok petani dan diwakili oleh Doelgani, Senen, Karso, Jam, Sumoningat, Sutami, dan Sarbito, dengan beranggotakan ribuan petani Banyuwangi, mengajukan pembukaan hutan secara resmi pada pemerintah Banyuwangi untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan penggarapan tanah hutan (Kwie 1943).

Empat tahun setelahnya, tepatnya pada 11 Januari 1929, Bupati Banyuwangi Raden Arya Adipati Mohammad (R.A.A.M.) Notohadisuryo menerima pengajuan para petani dan mengeluarkan keputusan secara resmi ‘Soerat Idin Memboeka Tanah’, “Kami memberikan mereka izin untuk membuka tanah dan memanfaatkan tanah-tanah tersebut di Sengkan Kandang dan Keseran seluas 4000 *bahu*, di Desa Sumberejo Pakel...” (1929).

Gambar 2. Soerat Idin Memboeka Tanah (1929)



Sumber: Arsip RTSP

Surat yang kemudian dikenal ‘Akta 1929’ memberi kepastian hukum untuk membuka hutan yang berbatasan dengan *Alas Pakel* di Desa Sumberejo Pakel. Hutan diperuntukkan bagi ribuan petani dengan pembagian 1 ¼ *bahu* bagi tiap orang, dengan hitungan 1 *bahu* untuk lahan pertanian dan ¼ *bahu* untuk dibangun rumah. Selain itu, petani Pakel juga dibekali tanah *Los* seluas kira-kira 200 *bahu* untuk desa-desa sekitarnya yang membutuhkan lahan garapan (Notohadisuryo 1943). Dengan kabar tersebut, ribuan petani Banyuwangi melakukan pembukaan lahan di tengah hutan. Namun, selang beberapa bulan, para petani dihalang-halangi, ditangkap, dipenjara, dan bahkan, pemerintah kolonial Belanda menganggap petani yang menggarap tanah hutan telah ‘beraksie kominis’ (Kwie 1943).

Bupati Notohadisuryo ditentang oleh Residen Besuki di Bondowoso karena rencana tersebut tidak disetujui oleh Dienst van het Boswezen (Dinas Kehutanan Hindia Belanda). Meski ditentang oleh Residen Besuki di Bondowoso, Notohadisuryo tetap dalam pendiriannya, dan menyatakan pada Residen bahwa ia

“...telah sumpah diwajibkan menjaga kepentingan rakyat” (Kwie 1943). Rupanya, ketidaksetujuan Residen Besuki karena Boswezen tidak setuju sebab tanah tersebut akan diserahkan pada pihak lain. Selain itu, setelah keputusan diteken, penentangan terhadap keputusan bupati tidak hanya datang dari Residen maupun Boswezen, tetapi dari berbagai aparat pemerintah kolonial di Banyuwangi; Bupati sesudahnya, Asisten Residen, Wedono, Asisten Wedono, Mandor Perhutanan, bahkan petinggi Desa Sumberejo Pakel sendiri menghalang-halangi perkumpulan petani membuka hutan.

Berbagai pembuktian menyatakan bahwa petani Sumberejo Pakel berhak atas hutan tersebut, tetapi upaya menghalang-halangi petani untuk menggarap lahannya tetap terjadi; perampasan surat-surat keputusan yang menyatakan bahwa petani berhak atas hutan tersebut, perampasan alat-alat pertanian, bahkan penangkapan dan pemenjaraan berkali-kali terjadi. Rupanya, penentangan terhadap keputusan bupati bukannya tanpa sebab. Ketidaksetujuan Residen Besuki terhadap keputusan Bupati Notohadisuryo, berikut tindakan aparat pemerintah kolonial dan para pegawainya, disebabkan karena hutan Sengkan Kandang dan Keseran akan dijadikan perluasan perkebunan salah satu perusahaan perkebunan kopi, yaitu Perkebunan Pakuda. Sebagian tanah lainnya, akan digunakan untuk proyek permukiman-pertanian orang-orang Indo-Belanda, yaitu Kolonie Bate (Kwie 1977). Meski Notohadisuryo telah mengeluarkan keputusan sesuai hukum yang berlaku masa itu dan petani bersikukuh atas hutan tersebut, berbagai aparat pemerintah kolonial berusaha dengan segala upaya agar hutan yang dikenal Sengkan Kandang dan Keseran tidak jatuh ke tangan petani.

Meski secara *de facto* sekaligus *de jure* membuktikan petani Pakel berhak atas tanah hutan tersebut, tetapi petani Pakel tidak dapat secara leluasa menggarapnya. Bahkan, dalam salah satu surat mengenai konflik agraria tersebut, Notohadisuryo setelah pensiun menuliskan, “Di sini ada suatu pertentangan di antara kemurkaan kaum perusahaan kebun dengan segolongannya bangsa Belanda-Indo dan kelaparan tanah orang bumi (biasa disebut orang kecil) yang ditakdir melarat itu. Dari itu adanya perselisihan ... perselisihan yang sedemikian itu kejadiannya tidak sekali itu saja.” (Notohadisuryo 1943)

Berbagai upaya dilakukan perusahaan perkebunan untuk menghalangi para petani menggarap tanah hutan Sengkan Kandang dan Keseran. Dengan begitu, tampak kekuasaan perusahaan perkebunan sekaligus tuan tanah Belanda melampaui kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Di sini, penting untuk mengetahui siapa pengusaha yang berada di balik perusahaan Perkebunan Pakuda dan bagaimana petani Pakel mempertahankan tanah hutannya.

C. Petani Pakel *vis-a-vis* Perkebunan Pakuda

Perkebunan Pakuda (N.V. Cultuur Maatschappij Pacouda) merupakan perusahaan perseroan terbatas yang didirikan pada 15 September 1911 yang mempunyai kantor pusat di Den Haag, (Scheveningen) Zeekant 99, Belanda. Dengan modal Prancis-Belanda senilai f 2.600.000 (setara sekitar 22 Miliar rupiah saat ini), perusahaan tersebut mengantongi izin beroperasi selama 75 tahun di Hindia Belanda (Desfossés 1881-1937: 912). Berkantor cabang di Jember (Brinkman's Advertentiebureau 1937: 68, 176), Perkebunan Pakuda membudidayakan tanaman kopi dan karet, dengan lokasi awal perkebunan di Garahan (Jember), Taman Glugo I - II, Gunung Patrang, Pakuda, Patrang (Banyuwangi), Sri Wulseng I - II (lokasi tidak diketahui).

Pada masa depresi ekonomi awal abad ke-20, setelah menguasai sebagian wilayah hutan di sekitar Desa Sumberejo Pakel—bahkan sebagian *Alas* Pakel sekalipun telah masuk tanah R.v.E (*Rech van Erpacht*) yang akan direncanakan menjadi wilayah tanam perkebunan (Departement van Binnenlandsch Bestuur 1915: 98-101), Perkebunan Pakuda kembali mengajukan pembukaan tanah *erpacht* lainnya untuk perluasan, tetapi tidak kunjung diterima. Rupanya, tanah hutan yang diminta oleh Perkebunan Pakuda merupakan tanah yang sedang digarap oleh perkumpulan petani di Desa Sumberejo Pakel. Namun, pengusaha di balik Perkebunan Pakuda memakai pengaruhnya untuk menjegal petani Pakel dalam menggarap hutan Sengkan Kandang dan Keseran.

Selang dua bulan Perkebunan Pakuda resmi berdiri, koran *Le Capitaliste* (Paris, Prancis) memuat laporan mengenai perkebunan tersebut sekaligus memuat informasi jajaran pimpinan (dewan direksi) perusahaan. Perkebunan Pakuda

dipimpin, oleh: Antoine Bernard, G. Levesque du Rostu, Henry Jahan de Laudonniere, Heurtaux Varsavaux, Charles Engeringh, dan Allart Gerard Nicolaas (A.G.N.) Swart (1911: 847). Pimpinan Perkebunan Pakuda rupanya konglomerat dalam jaringan bisnis dunia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka terlibat dalam berbagai perusahaan perkebunan, pertambangan, pertanian, konstruksi, properti, investasi, perbudakan, dan beragam industri-eksploitasi multinasional (Profil pemimpin dan perusahaan disarikan dari berbagai sumber dengan penelusuran terkait nama, jenis perusahaan, latar belakang, dan letak wilayah perusahaan. Analisis dilakukan atas dasar data berikut: D-FIH Project: Desfossés 1881-1937; *Les Entreprises Coloniales Françaises: Société de culture de Pacouda*; *Le Capitaliste* 1911: 847; Japikse, Brugmans, Aardweg 1938: 1439). Terlibat dalam berbagai perkebunan di Hindia Belanda, mereka juga menjalankan perkebunan di sekitar hutan Desa Sumberejo Pakel.

Pertama, Antoine Bernard. Ia ketua dewan direksi perusahaan Hauts Fourneaux et des Forges et Acieries de Denain - Anzin, sebuah pabrik industri baja di Prancis. Bernard juga tercatat sebagai administrator perusahaan tambang Aniche Mining Company di Courrieres Prancis dan perusahaan tambang batu bara Ottoman Society of Heraclea di Turki. Di Perkebunan Pakuda, ia menjabat sebagai presiden perusahaan. Kedua, G. Levesque du Rostu. Ia menjabat sebagai sekretaris di Societe Financiere Francaise et Coloniale, sebuah perusahaan bank investasi di Prancis. Di Perkebunan Pakuda, Levesque menjabat sebagai anuitan perusahaan perkebunan.

Ketiga, Henry Jahan de Laudonniere. Ia menjabat sebagai administrator perusahaan tambang emas Mine d'or du Châtelet di Creuse di Prancis. Ia juga seorang administrator perusahaan Compagnie Franco-Belge pour l'industrie du Plomb, perusahaan Prancis-Belgia yang juga mengelola perusahaan tambang Nontron Saint Pardoux di Dordogne (Prancis). Ia juga terlibat dalam perusahaan tambang emas Bonnac di Cantal (Prancis), perusahaan tambang Societe Anonyme des Mines Gallo Romaines di Haute-Vienne (Prancis), perusahaan tambang dan pabrik di Santomera (Spanyol), dan pemegang konsesi perusahaan tambang emas

Mispickel Auriferous di Haute-Vienne (Prancis). Di Perkebunan Pakuda, Jahan menjabat sebagai pemilik properti.

Keempat, Heurtaux Varsavaux. Ia seorang pengacara di pengadilan tinggi, menjadi seorang administrator perusahaan batu bata dan produk tahan api Les Produits Siliceux di Belgia dan perusahaan pertanian Cie Africaine de Sisal di Senegal, Afrika Barat. Selain itu, ia memegang jabatan penting sebagai direktur di Societe Generale (SocGen) di Angers (kota bagian barat Prancis). Sebagai bank investasi multinasional yang berpusat di Paris, Prancis, SocGen juga terlibat dalam investasi di Perkebunan Pakuda di Banyuwangi—sebagai catatan tambahan: setelah seabad yang lalu mendanai perkebunan Pakuda, SocGen (Societe Generale Hongkong Branch; Societe Generale Asia Limited) kini beroperasi dan mendanai pertambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi (Afandi 2021: 49). Selain terlibat dalam perusahaan jasa Societe de culture de Panou-Lisan, Varsavaux terlibat dalam perkebunan di Jember (Kalitengah) dan Banyuwangi (Perkebunan Pakuda).

Kelima, Charles Engeringh. Ia menjabat direktur pelaksana dalam perusahaan Compagnie des Sultanats du Haut-Oubangui, perusahaan karet dan gading yang disokong oleh pemerintah Prancis (dan didanai pemegang saham di Eropa) untuk mengeksploitasi tanah dan memperbudak penduduk di Ubangi-Shari, wilayah jajahan Prancis, di Afrika Tengah (saat ini Republik Afrika Tengah). Engeringh juga menjadi salah satu direktur di perusahaan Buloh Kasap Rubber Plantations Limited di Johor, Malaysia. Di Hindia Belanda, Engeringh terlibat dalam berbagai perusahaan pertambangan dan bisnis konstruksi jalan raya, rel kereta api, dan perusahaan perikanan. Dalam bisnis perkebunan, ia terlibat di Kalitengah (Jember), Tamiang (Aceh), Tapanuli (Sumatera Utara), Cisalak (Banten), dan berbagai perusahaan lainnya. Di Perkebunan Pakuda, Engeringh menjadi salah satu administrator dan menjabat sebagai presiden direktur.

Keenam, Allart Gerard Nicolaas (A.G.N.) Swart. A.G.N. Swart anak seorang pejabat negeri Belanda, ayahnya bekerja di Mahkamah Agung sekaligus anggota Dewan Negara Belanda dan Dewan Perwakilan H.M. de Koningin (Ratu Belanda). Swart bekerja di Ministerie van Kolonien (Kementerian Koloni) di Den

Haag, kementerian negeri Belanda yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan wilayah yang dijajah Belanda. Selama bekerja di Kementerian Koloni, ia melakukan penelitian mengenai budidaya karet. Dari sini, Swart memulai karir bisnisnya dalam industri perkebunan.

Peran Swart dalam perkebunan tidak bisa dianggap remeh, dengan modal Prancis-Belgia ia mencoba mendirikan perkebunan di Hindia Belanda (De Bantamsche Plantage Mij dan Culture Mij Nieuw Tjisalak, Jawa Barat). Swart juga menjadi komisi khusus Belanda dalam mengkampanyekan perkebunan di tanah jajahan ke berbagai pengusaha dalam pameran karet dunia di London pada 1908 dan Brussel pada 1910. Swart kemudian menulis buku *Rubber Companies in the Netherland East Indies* (Perusahaan Karet di Hindia Belanda) pada 1911 dan mengadakan pagelaran International Rubber Award di London pada tahun yang sama. Selain itu, Swart memegang jabatan sebagai direktur berbagai perusahaan yang didirikan dari modal Prancis-Belanda, terlibat dalam berbagai perkebunan di Hindia Belanda seperti di Cisalak (Banten), Tamiang (Aceh), Tapanuli (Sumatera Utara), Kalitengah (Jember), dan Banyuwangi. Sebagai salah satu tokoh penting negeri Belanda yang masuk dalam buku biografi orang Belanda *Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld* (1938), Swart menjadi salah satu pimpinan dan pemegang saham Perkebunan Pakuda di sekitar wilayah hutan Desa Sumberejo Pakel.

Gambar 3. Allart Gerard Nicolaas (A.G.N.) Swart.



Sumber: (N. Japikse (et all), 1938: 1439).

Dengan berbagai latar belakang penguasa *cum* pengusaha dalam Perkebunan Pakuda seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak mengherankan jika dalam praktiknya, perkebunan tersebut mempunyai kontrol yang besar terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Bupati Banyuwangi Notohadisuryo, meski dalam sistem administrasi pemerintah sebagai pejabat yang berhak menetapkan keputusan untuk berpihak pada rakyat kecil, harus menghadapi pengusaha yang tidak hanya memiliki pengaruh dalam pemerintah kolonial Hindia Belanda tetapi juga dalam Kerajaan Belanda dan bahkan memiliki pengaruh dalam jaringan bisnis dunia. Praktis, kelompok petani di Desa Sumberejo Pakel, disadari maupun tidak, sedang menghadapi pengusaha bisnis multinasional yang memiliki pengaruh dalam ekonomi dan politik dunia pada awal abad ke-20.

Demi memperjuangkan tanah, melalui perkenalan dengan seorang aktivis gerakan nasional Dr. R.M. Slamet Sudibyo (anggota Partai Indonesia Raya, fusi Boedi Oetomo dan Partai Bangsa Indonesia, dan sekaligus Pengurus Besar Roekoen Tani asal Banyuwangi) dan Mr. Tjan Gwan Kwie (anggota Tiong Hoa Hwee Kwan), petani Pakel pada 1943 bergabung dengan Roekoen Tani (RT) (Kwie 1943; Kwie 1977). Organisasi Roekoen Tani tumbuh pada masa depresi ekonomi tahun 1930-an. Pada 1933, Roekoen Tani mempunyai lebih dari 20.000 anggota yang tergabung dalam 125 cabang. Lalu pada 1940, anggota Roekoen Tani terus bertambah hingga mencapai lebih 35.000 anggota dalam 145 cabang di berbagai wilayah. Daerah Jawa Timur menjadi basis massa terbesar anggota Roekoen Tani. Dengan perkembangannya, Roekoen Tani menjadi organisasi perdesaan terbesar yang berafiliasi dengan gerakan nasionalis pada masa itu (Ingleson 1972: 416; Anderson 1990: 270; Panjebur Semangat 1939: 3; Panjebur Semangat 1940: 20; Panjebur Semangat 1940: 3).

Dokter Soetomo, salah satu perintis gerakan nasional, merupakan tokoh penting di balik berdiri dan berkembangnya gerakan petani tersebut (Kasenda 2013: 9-187). Dengan perkembangan Roekoen Tani yang demikian pesat, pemerintah kolonial khawatir dengan gerakan sosial yang mempunyai potensi mengganggu “keamanan” dan “ketertiban”, apalagi dengan upaya aktivis nasionalis yang semakin radikal dan mencoba menghubungkan gerakan buruh

perkotaan dengan petani di perdesaan (Ingleson 2008: 53). Dalam perjalanannya, banyak dari anggota Roekoen Tani yang nantinya terlibat dalam perang dan revolusi (Kroef 1951: 183), begitu pula dengan petani Pakel yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Indonesia (Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi: 1964).

Gambar 4. Kongres Roekoen Tani di Paree (1941)



Sumber: Panjebar Semangat, No. 8 Th. IX, 1 November 1941.

Selain aktif terlibat dalam berbagai pertemuan antara petani dan berbagai kelompok gerakan, mendirikan koperasi (Loemboeng Cooperatie), mengadakan pendidikan politik dan ekonomi, mengadakan kongres, pameran hasil bumi, pasar malam, dan kegiatan lainnya (Panjebar Semangat 1941), anggota Roekoen Tani juga kerap terlibat dalam konflik agraria (ADIL 1933: 2). Begitu pula dengan petani Pakel, meski telah menjadi anggota organisasi Roekoen Tani dan telah didampingi kuasa hukum Mr. Tjan Gwan Kwie, perjuangan petani Pakel tidak mudah dalam menghadapi Perkebunan Pakuda.

D. Jalan Panjang Mempertahankan Tanah Hutan

Setelah Bupati Banyuwangi Notohadisuryo meneken surat keputusan 'Soerat Idin Memboeka Tanah' pada 11 Januari 1929, petani Pakel mulai menggarap tanah hutan tersebut, "... dengan gemar hati mulai beramai-ramai menggantas dan membat itu hutan" (Kwie 1943). Pada tahun pertama, sekitar

tiga bulan membuka tanah hutan tersebut, petani telah menggarap tanah seluas kira-kira 300 *bahu* dan sejumlah kurang lebih 250 petani telah mendapatkan surat hak tanah yasan. Namun, sejak awal penggarapan tanah hutan, petani Pakel mulai menghadapi berbagai rintangan. Tahun tersebut sebagai penanda perjuangan petani Pakel menggarap tanah secara bersama, sekaligus juga menjadi penanda awal perampasan tanah hutan Sengkan Kandang dan Keseran.

Sepanjang satu dekade lebih setelah keputusan bupati dan petani berupaya menggarap tanah hutan Sengkan Kandang dan Keseran, sepanjang itu pula petani Pakel menghadapi berbagai upaya tindakan perampasan tanah tersebut. Penangkapan anggota kelompok petani, perampasan alat pertanian, hukuman kerja paksa, dan pemenjaraan petani berkali-kali terjadi. Namun, petani Pakel tetap dalam pendiriannya, mereka tetap melakukan *reclaiming* meski selalu ditangkap, “berasa jemu dengan ini macam gangguan, maka mereka ambil putusan buat terus babat saja, biarpun berulang-ulang ditahan dan dihukum” (Kwie 1943). Tiap mereka melakukan babat hutan, puluhan hingga ratusan petani ditangkap, setelah bebas dari hukuman penjara, para petani Pakel berupaya merebut kembali tanah hutannya.

Petani Pakel melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan tanah hutan Sengkan Kandang dan Keseran. Baik upaya hukum, melayangkan protes ke berbagai aparat pemerintah Banyuwangi, Jawa Timur, maupun Gubernur Jenderal di Batavia (Jakarta), sekaligus melakukan *reclaiming* secara langsung di tanah hutan tersebut. Perjuangan petani Pakel terus berlanjut hingga kolonialisme Belanda berakhir dan berganti pemerintahan di bawah kolonialisme Jepang. Namun, berbagai upaya tersebut tidak kunjung menuai hasil.

Pengalaman pahit selama memperjuangkan tanah; kekerasan, ditangkap, perampasan surat dan alat pertanian, surat-surat dipalsukan, dihalangi-halangi, berkali-kali dipenjara, dan petani tidak kunjung mendapatkan haknya, “...biarpun sejengkal tanah”, ungkap Tjan Gwan Kwie dalam satu surat pembelaannya (1943). Pengalaman ini, membuat petani Pakel harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dalam memperjuangkan ruang hidupnya. Mantan Bupati Banyuwangi Notohadisuryo (setelah bertahun-tahun pensiun) bersedia membantu

petani Pakel dalam memperjuangkan tanahnya. Bergabungnya dengan organisasi Roekoen Tani, sekaligus didampingi kuasa hukum Mr. Tjan Gwan Kwie, petani Pakel kembali memperjuangkan tanah hutan di desanya.

Tjan Gwan Kwie menemukan berbagai peristiwa yang menunjukkan upaya sistematis untuk menghalangi petani menggarap tanah hutan Sengkan Kandang dan Keseran. Tjan Gwan Kwie mencoba menarik benang kusut dalam konflik tersebut. Menurut Tjan Gwan Kwie, ada beberapa permasalahan yang menjadi catatan penting untuk mengurai sengketa tanah Sengkan Kandang dan Keseran di wilayah hutan Desa Sumberejo Pakel (1943: 4-9).

Pertama, meskipun setelah keputusan tahun 1929, Residen Besuki, Bupati Banyuwangi, Asisten Residen, Distrik Rogojampi, Kawadenan Kabat, Boswezen Malang dan Banyuwangi, menyatakan tidak ada izin atau tidak sah secara hukum, tetapi pihak yang menyatakan demikian tidak sanggup menunjukkan surat penolakan atau menjelaskan dasar hukumnya. Kedua, jika surat atau dokumen perkumpulan petani dianggap tidak sah, mengapa dokumen tersebut dirampas, disembunyikan, dan bahkan dicoba-lenyapkan. Di sini ada upaya pemerintah kolonial mencoba menyembunyikan keputusan bupati sebelumnya, yaitu keputusan 'Soerat Idin Memboeka Tanah' pada tahun 1929.

Ketiga, surat 'tjap djempol' yang dibuat di Kabat merupakan surat yang dibuat pada tahun 1938, jauh setelah keputusan bupati tahun 1929. Surat tersebut dibuat secara paksaan dan tidak ditandatangani oleh semua pengurus perkumpulan petani. Surat tersebut mengenai hutan Bate dan bukan hutan Sengkan Kandang dan Keseran. Selain itu, jika memang hutan tersebut bukan hak petani, mengapa pengurus perkumpulan petani dipaksa menandatangani pelepasan hak dengan surat dari Kabat. Ada upaya manipulasi dokumen, dengan cara mengganti nama hutan yang dimaksud menjadi hutan Bate (tanah *landbouw*). Alasan lainnya, untuk perkebunan pegawai Belanda (*kleinlandbouw*), padahal untuk pegawai Belanda telah disediakan tanah seluas kira-kira 800 *bahu* di Berasan dan 1000 *bahu* di Kaselir. Manipulasi tersebut dilakukan agar ketika dilakukan penyelidikan, seakan-akan hutan tersebut bukan hak petani. Di sini jelas bahwa

pemerintah sekalipun mengakui bahwa hutan tersebut secara hukum milik petani, oleh sebab itu, manipulasi dokumen dilakukan.

Keempat, hutan Sengkan Kandang dan Keseran juga menjadi incaran para tuan tanah, seperti Satnjo petinggi Desa Balak, Dirdjo (*kamituwo* dan saudara petinggi desa) Carik Desa Balak, haji Djabar yang terkenal kaya raya, dan mandor hutan Soewilah. Tuan tanah tersebut mendapatkan tanah seluas masing-masing 15 hektar. Usut punya usut, tanah-tanah tersebut kemudian diperjualbelikan kepada petani-petani miskin yang membutuhkan lahan garapan.

Kelima, pihak Boswezen tidak sepakat jika hutan tersebut dikelola oleh petani, dengan alasan hutan tersebut tidak layak; hutan *tutupan*, tanahnya miring, penuh jurang, rawan banjir, dan tidak cocok dijadikan sawah atau ladang. Namun, kenyataannya, hutan tersebut sangat subur, memiliki banyak sumber mata air, dan tanahnya yang sebagian besar rata membuatnya cocok untuk ditanami. Jika hutan tersebut tidak layak, mengapa hutan tersebut menjadi rebutan banyak pihak. Sebagai bukti—mengabaikan petani yang mulai menggarap hutan tersebut, sekitar tahun 1936 - 1937 sebagian tanah hutan tersebut telah ditanami kopi dan karet, bagian bawah oleh 18 perkebunan orang Belanda (*kleinlandbouw*) dan bagian atas oleh Perkebunan Pakuda (Kalimas).

Keenam, ketika Bupati Banyuwangi Notohadisuryo mengeluarkan keputusan tahun 1929, berdasarkan peta yang ada, hutan yang masih lebat tersebut bukan tanah *pemajekan*, bukan hutan *tutupan*, dan bukan pula hutan yang termasuk dalam Boswezen. Jadi, sejak kapan hutan tersebut masuk hutan *tutupan* dan atau hutan Boswezen? Perkebunan Pakuda, yang telah menggarap di dekat hutan tersebut, telah meminta hak *erpacht* untuk perluasan, tetapi juga belum diputuskan. Ada kemungkinan kendala tersebut sebab hutan secara hukum telah menjadi hak para petani di Desa Sumberejo Pakel.

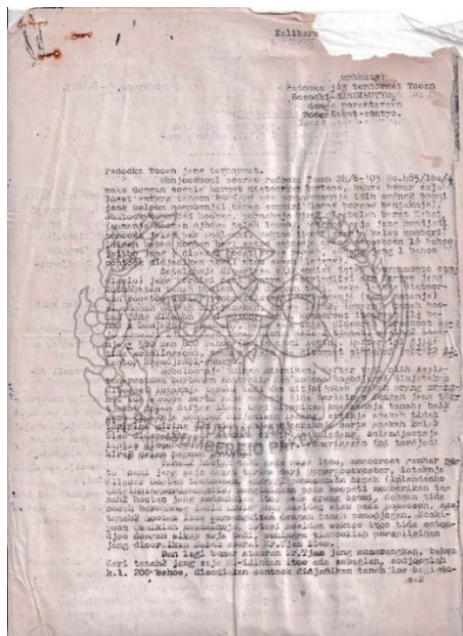
Sekitar enam bulan setelah Tjan Gwan Kwie melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, tepatnya pada 31 Maret 1943, Roekoen Tani kembali melayangkan surat yang menuntut penyelesaian kasus sengketa tanah pada Syutyokan (Residen) di Bondowoso. Lalu, 9 hari kemudian, pada 9 April 1943, Tjan Gwan Kwie juga mengirimkan surat beserta lampiran yang menjelaskan, berdasarkan penelitiannya

(seperti yang telah dijelaskan di atas), secara gamblang permasalahan yang terjadi di Desa Sumberejo Pakel. Kasus tersebut kembali dibuka dan mulai menjadi pertimbangan dalam pemerintahan Besuki masa kolonial Jepang.

Dua bulan berselang, tepatnya pada 24 Juni 1943, Aiseibutyo selaku Syutyokan Besuki mengirim surat pada mantan Bupati Banyuwangi Notohadisuryo yang menanyakan benar tidaknya surat keputusan pembukaan tanah hutan Sengkan Kandang dan Keseran. Lima hari kemudian, pada 29 Juni 1943, Notohadisuryo membalas surat tersebut:

Benar saya ingat antara tahun 1925 - 1928, ada permohonannya izin orang-orang bumi yang belum mempunyai tanah sendiri (lupa berapa banyaknya), untuk memabat hutan ... maka saya ingat di daerah tersebut saya memberi izin babat tanah hutan ... tetapi Residen waktu itu tidak setuju dengan sikap saya tadi, sehingga timbullah perselisihan yang diuraikan dalam surat Mr. Tjan itu. ... tetapi memang nyata maksudnya Residen dulu: tanah-tanah hutan tadi yang sebagian besar akan disediakan untuk diminta dengan hak *erfpacht* buat menambah lebarnya kebun kopi salah satu perusahaan kebun (Perkebunan Pakuda -*pen*) yang berbatasan dengan tanah-tanah hutan itu dan yang sebagian lagi untuk *kleinlandbouw* (Kolonie Bate -*pen*) ... jika barang kiranya penjelasan ini belum cukup, kalau diminta, tambahan keterangan akan segera disusulkan. (Notohadisuryo 1943)

Gambar 5. Surat R.A.A.M. Notohadisuryo (1943)



Sumber: Arsip RTSP

Kasus sengketa tanah Sengkan Kandang dan Keseran tampak mulai menemukan titik penyelesaian. Syutyokan Besuki menyatakan akan menyerahkan kembali tanah yang memang menjadi hak petani di Desa Sumberejo Pakel. Nahasnya, belum terlaksana maksud tersebut, tiba-tiba bom sekutu Jepang dua kali jatuh menghantam Banyuwangi. Penyelesaian kasus tersebut memang bersamaan dengan perang dunia kedua. Tjan Gwan Kwie menemui Asisten Residen Banyuwangi di tempat di mana bom-bom tersebut jatuh, ia menyatakan, “Bilamana saya dapat memutuskannya tentu saya segera menyerahkan tanah tadi kepada rakyat, yang memang berhak atas dasar keputusan tuan Bupati” (Kwie 1977).

Upaya penyelesaian konflik perebutan tanah hutan pun menjadi berantakan. Tragedi bom di Banyuwangi membuat penyelesaian masalah tanah hutan tidak lagi menjadi perhatian. Tjan mencatat, “kami belum juga berhasil menolong rakyat yang sungguh sangat membutuhkan tanah sekadar untuk memperbaiki nasibnya” (Kwie 1977). Sebab perang yang tengah berkecamuk, penyelesaian konflik perebutan tanah hutan tersebut tidak kunjung diselesaikan. Petani Sumberejo Pakel, dalam mempertahankan tanah hutan Sengkan Kandang dan Keseran, harus menghadapi jalan perjuangan yang panjang.

KESIMPULAN

Penelusuran sejarah konflik petani Pakel dengan Perkebunan Pakuda pada 1925-1943 menjadi ikhtiar untuk memahami secara utuh konflik agraria yang terjadi di Desa Sumberejo Pakel. Berbagai upaya telah dilakukan petani Pakel dalam memperjuangkan tanah di desanya. Dari proses penyelesaian secara hukum masa itu, bergabung dengan organisasi petani nasional Roekoen Tani, didampingi kuasa hukum Mr. Tjan Gwan Kwie, sekaligus mendapat dukungan dari mantan Bupati Banyuwangi Notohadisuryo, dan petani Pakel tetap harus merebut kembali atau melakukan *reclaiming* secara langsung tanah hutan Sengkan Kandang dan Keseran.

Sejarah periode tersebut penting, sebab masa itu, dapat dikatakan sebagai awal mula dari konflik agraria berkepanjangan yang terjadi setelahnya. Meski

Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan dan penguasa kolonial telah hengkang, petani Pakel tetap harus menjalani ‘pekerjaan rumah’ yang belum terselesaikan. Dalam perkembangannya, pengusaha perkebunan memang beralih rupa, tetapi pola perampasan tanah nyaris sama. Kini, petani Pakel harus sekali lagi dan berulang kali, bahkan nyaris satu abad lamanya, untuk terus berjuang atas tanah hutan yang menjadi bagian dari ruang hidupnya.

Sejarah konflik petani dengan perkebunan, seperti yang terjadi antara Roekoen Tani di Desa Sumberejo Pakel dan perkebunan kolonial Perkebunan Pakuda, merupakan satu dari sekian banyak peristiwa konflik pertanahan yang kerap tidak diperhatikan sepanjang sejarah Republik Indonesia. Padahal, sejarah penjajahan ialah sejarah perampasan ruang hidup dan sejarah melepaskan diri dari penjajahan ialah upaya untuk melawan perampasan atas ruang hidup. Namun, bahaya laten perampasan tanah warisan kolonialisme, seringkali (sengaja) dilupakan—apalagi jika yang terampas ialah orang-orang terpinggirkan; para petani, yang seringkali tidak mendapat tempat dalam panggung sejarah nasional Indonesia.

Memahami sejarah konflik agraria di Desa Sumberejo Pakel merupakan upaya mengingatkan, pentingnya sejarah tersebut sama halnya dengan sejarah Indonesia lainnya. Sebab tanpa adanya sejarah ‘orang-orang kecil’ seperti sejarah gerakan petani Pakel, maka sejarah yang dianggap besar seperti sejarah nasional Indonesia tidak memiliki jati diri yang kuat. Itu mengapa sejarah mestinya disusun dari bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad. 2021. *Menjarah Ujung Timur Pulau Jawa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Anderson, Benedict. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- _____. 2000. “Sembah Sumpah: Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa” hlm. 359 dalam *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia* ditulis oleh Benedict Anderson. Yogyakarta: Mata Bangsa.

- Anoegrajekti, Novi (dkk.). 2017. "Babad Blambangan: Sejarah Perlawanan Budaya Lokal dan Identitas." Seminar Internasional Pernaskahan Nusantara 2017 di Universitas Sebelas Maret, Surakarta 25-26 September 2017.
- Arifin, Winarsih. 1995. *Babad Blambangan*. Paris: Ecole Francaise d'Extreme-Orient dan Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Departement van Binnenlandsch Bestuur. 1915. *Lijst van 1914: I. Particuliere ondernemingen in Nederlandsch-Indië op gronden door het gouvernement afgestaan in huur en erfpacht ... Specerijperken op Banda*. Batavia: Landsdrukkerij.
- D-FIH Project. 1937. *Cote Desfossés, Compagnie des Agents de change de Paris, Annuaire des valeurs admises à la Cote officielle de la Bourse de Paris, 1881-1937*. Paris: Chambre Syndicale de la CAC de Paris.
- Gallica. 1911. Le Capitaliste: Journal de La Banque Parisienne, No. 48, 30 November 1911.
- Gottschalk, Louis. 2008. *Mengerti Sejarah, a.b. Nugroho Notosusanto*. Jakarta: UI Press.
- Indische Genealogische Vereniging. 1937. Brinkman's Advertentiebureau, *Brinkman's Cultuur-Adresboek voor Nederlandsch-Indie 1937: Ten Dienste van Handel, Industrie, Nijverheid*. Bandung: Brinkman's Advertentiebureau.
- Ingleson, John. 2008. "Sutomo, the Indonesian Study Club and organised labour in late colonial Surabaya." *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 39.
- Japikse N.; H. Brugmans; H.P. van den Aardweg. 1938. *Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld*. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf N.V.
- Kartodirdjo, Sartono, Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kasenda, Peter (ed.). 2013. *Dokter Soetomo*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leiden University Libraries. 1888. Topographische Inrichting, *Topographische Kaart der Residentie Besoeki Opgenomen Ingevolge Gouvernements Besluit van den 28sten Mei 1877, No. 13, in de Jaren 1878-1883, Peta*, Gravenhage.
- _____. 1915. Topographische Inrichting, *Litjin, District Ragadjampi, Afdeeling Banjoewangi, Java. Res. Basoeki, Peta*, Batavia.

- Les Entreprises Coloniales Françaises. *Société de culture de Pacouda*, 28 Februari 2022.
- M. van der Kroef, Justus. 1951. "Foreign Aid and Social Tradition in Indonesia." *Far Eastern Survey: American Institute of Pasific Relations*, No. 18 Vol. 20.
- Margana, Sri. 2003. "The "Puputan Bayu": War, Disease, and Demographic Catastrophe", 1771-1773. Leiden, 9 Agustus 2003. Dipresentasikan pada acara Third TANAP Workshop, Xiamen University, Xiamen, China.
- _____. 2012. *Ujung Timur Jawa, 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- _____. 2015. "Outsiders and Stigma: Reconstruction of Local Identity in Banyuwangi" dalam *Sites, Bodies and Stories: Imagining Indonesian History* yang disunting oleh Susan Legene (ed.). Singapore: NUS Press.
- Marx, Karl. 2004. *Kapital 1: Sebuah Kritik Ekonomi Politik*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Perpustakaan Nasional. 1933. ADIL, No. 202 Th. I, Peroesahaan Dagblad, Solo, 3 Juni 1933.
- _____. 1939. Panjebar Semangat, No. 48 Th. VI, 29 Juli 1939.
- _____. 1940. Panjebar Semangat, No. 38 Th. VII, 18 Mei 1940.
- _____. 1940. Panjebar Semangat, No. 49 Th. VII, 03 Agustus 1940.
- _____. 1941. Panjebar Semangat, No. 8 Th. IX, 1 November 1941.
- Priyadi, Sugeng. 2015. *Sejarah Lokal: Konsep, Metode, dan Tantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Roosa, John (eds.). 2004. "Pengantar: Sejarah Lisan dan Ingatan Sosial" hlm. 1-23 dalam *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65, Esai-esai Sejarah Lisan* disunting oleh John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid. Jakarta: Elsam.
- Rukun Tani Sumberejo Pakel. 1929. Surat Izin Membuka Tanah, *Soerat Idin Memboeka Tanah, Acta Van Verwizing, In Naam Berkoningin*, 11 Januari 1929, Banyuwangi.
- _____. 1943. Notohadisuryo 'Padoeka jang terhormat Tooan Besoeki – AISEIBUTYO dengan perantaraan Toean Kabat-sontyo', Kalibaru.
- _____. 1943. Tjan Gwan Kwie, *Soerat Memorie*, Banyuwangi.
- _____. 1943. Tjan Gwan Kwie, *surat untuk Sutyokan Besuki*, Banyuwangi.
- _____. 1964. *Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi*, No. 317/D./Kpts/MUV.1964, Jakarta.

- _____. 1977. Tjan Gwan Kwie, *Laporan Penyelewengan Tanah Hutan "Sengkankandang lan Keseran"*, Jember.
- _____. 2000. Rukun Tani, *Laporan Sejarah Tanah Hutan Sengan Kandang dan Keseran Desa Pakel Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur*, Banyuwangi.
- Schoel, W. F. 1931. *Alphabetisch Register van de Administratieve En Gerechtigke Indeling van Nederlandsch-Indie. Deel I: Java en Madoera*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Thompson, Paul. 2012. *Suara Dari Masa Silam: Teori dan Metode Sejarah Lisan*. Yogyakarta: Penebit Ombak.
- Wawancara. Mahmudah. Dusun Krajan, Sumberejo Pakel, Banyuwangi 25 September 2021.